



**KEMENTERIAN KOORDINATOR  
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **RINA P. SOEMARNO**  
Jabatan : **Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri**

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **MOH. MAHFUD MD**  
Jabatan : **Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan**

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA pada Tahun 2024 berjanji mewujudkan target kinerja tahunan sesuai dengan lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini, dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan ataupun sanksi.

**PIHAK KEDUA,**

**MOH. MAHFUD MD**

Jakarta, Januari 2024  
**PIHAK PERTAMA,**

**RINA P. SOEMARNO**

**FORMULIR PERJANJIAN KINERJA  
TINGKAT UNIT ORGANISASI ESELON I  
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN**

Unit Organisasi Eselon I: Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri  
Tahun Anggaran : 2024

<b>Sasaran Strategis (1)</b>	<b>Indikator Kinerja (2)</b>	<b>Target (3)</b>
1. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Bidang Politik Luar Negeri lintas sektoral yang efektif;	a. Persentase (%) capaian target pembangunan bidang Politik Luar Negeri pada K/L dibawah Koordinasi Kemenko Polhukam sesuai dokumen perencanaan nasional	100%
	b. Persentase (%) rekomendasi kebijakan yang dapat mendukung capaian target pembangunan bidang Politik Luar Negeri dalam dokumen perencanaan nasional	100%
	c. Persentase (%) rekomendasi kebijakan bidang Politik Luar Negeri yang ditindaklanjuti	100%
2. Pemenuhan Layanan Dukungan Manajemen yang optimal	a. Nilai SAKIP	76,9
	b. Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat Deputi	4

Jumlah Anggaran Program Peningkatan Koordinasi Bidang Bidang Politik Luar Negeri adalah sebesar Rp10.243.130.000,- (Sepuluh Miliar Dua Ratus Empat Puluh Tiga Juta Seratus Tiga Puluh Ribu Rupiah).

**Menteri Koordinator  
Bidang Politik, Hukum dan Keamanan  
Republik Indonesia**

  
**MOH. MAHFUD MD**

**Deputi Bidang Koordinasi  
Politik Luar Negeri**



**RINA P. SOEMARNO**

**DOKUMEN MANUAL PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
DEPUTI BIDANG KOORDINASI POLITIK LUAR NEGERI**

<b>Sasaran Strategis 1</b>	<b>Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Bidang Politik Luar Negeri lintas sektoral yang efektif</b>
<b>Indikator Kinerja 1</b>	<b>Persentase (%) capaian target pembangunan bidang Politik Luar Negeri pada K/L dibawah Koordinasi Kemenko Polhukam sesuai Dokumen Perencanaan Nasional</b>
Definisi	<p>Mengukur sejauh mana capaian target pembangunan bidang politik luar negeri pada K/L di bawah koordinasi Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri sesuai dengan Dokumen Perencanaan Nasional. Target pembangunan bidang politik luar negeri pada K/L yang dikoordinasikan oleh Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Indeks Pelayanan dan Perlindungan WNI di Luar Negeri (Target 2024=92);</li> <li>b. Indeks Citra Positif Indonesia di mata dunia internasional (Target 2024=4);</li> <li>c. Persentase Forum Internasional yang Dipimpin Menko Polhukam pada Tingkat Bilateral, Regional dan Multilateral (Target 2024=75%).</li> </ul>
Sumber Data	<p>Capaian target pembangunan bidang politik luar negeri pada K/L yang dikoordinasikan oleh Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Indeks Pelayanan dan Perlindungan WNI di Luar Negeri;</li> <li>b. Indeks Citra Positif Indonesia di mata dunia internasional;</li> <li>c. Persentase Forum Internasional yang Dipimpin Menko Polhukam pada Tingkat Bilateral, Regional dan Multilateral.</li> </ul>
Cara Menghitung	$\text{Capaian} = \frac{A + B + C}{3}$ <p style="text-align: center;">             Capaian Indeks Pelayanan dan Perlindungan WNI di Luar Negeri Tahun 2024  <math>A = \frac{\text{Capaian Indeks Pelayanan dan Perlindungan WNI di Luar Negeri Tahun 2024}}{91} \times 100\%</math> </p> <p style="text-align: center;">             Capaian Indeks Citra Positif Indonesia di mata dunia internasional Tahun 2024  <math>B = \frac{\text{Capaian Indeks Citra Positif Indonesia di mata dunia internasional Tahun 2024}}{3,95} \times 100\%</math> </p> <p style="text-align: center;">             Forum Internasional yang Dipimpin Menko Polhukam pada Tingkat Bilateral, Regional dan Multilateral  <math>C = \frac{\text{Forum Internasional yang Dipimpin Menko Polhukam pada Tingkat Bilateral, Regional dan Multilateral tahun 2024}}{6 \text{ Rencana Forum Internasional yang Dipimpin Menko Polhukam pada Tingkat Bilateral, Regional dan Multilateral tahun 2024}} \times 100\%</math> </p>
<b>Indikator Kinerja 2</b>	<b>Persentase (%) rekomendasi kebijakan yang dapat mendukung capaian target pembangunan bidang Politik Luar Negeri dalam dokumen perencanaan nasional</b>

Definisi	Mengukur sejauh mana rekomendasi yang dihasilkan dapat mendukung terhadap pembangunan bidang Politik Luar Negeri yang tertuang dalam Dokumen Perencanaan Nasional. Isu Dokumen Perencanaan Nasional yang akan didukung pada rekomendasi Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri yaitu: a. Indeks Pelayanan dan Perlindungan WNI di Luar Negeri pada Sub IKU-1 (Penyelesaian Kasus WNI di luar negeri) dan Sub IKU-4 (Diplomasi Perlindungan WNI di luar negeri); b. Indeks Citra Positif Indonesia di mata dunia internasional pada dimensi pemerintahan dan penegakkan hukum ( <i>governance and rule of law</i> ); c. Jumlah Forum yang Dipimpin Indonesia pada Tingkat Bilateral, Regional dan Multilateral dalam mendukung keketuaan ASEAN pada tahun 2024, dalam mendukung Optimalisasi Kontribusi Indonesia pada sidang PBB dan dalam mendukung proses aksesi Indonesia untuk dapat diterima sebagai full member pada Financial Action Task Force (FATF).
Sumber Data	Rata-rata capaian persentase rekomendasi kebijakan pada unit Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri yang mendukung Dokumen Perencanaan Nasional.
Cara Menghitung	$\text{Capaian} = \frac{\text{Jumlah rekomendasi kebijakan yang mendukung Pembangunan Bidang Politik Luar Negeri}}{\text{Jumlah capaian rekomendasi kebijakan pada unit Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri}} \times 100\%$
<b>Indikator Kinerja 3</b>	<b>Persentase (%) rekomendasi kebijakan bidang Politik Luar Negeri yang ditindaklanjuti</b>
Definisi	Mengukur sejauh mana rekomendasi yang dihasilkan dapat mendukung terhadap tercapainya pembangunan bidang Politik Luar Negeri yang tertuang dalam Dokumen Perencanaan Nasional. Hal ini diperlukan agar Kemenko Polhukam dapat melakukan monitoring dan <i>follow up</i> atas rekomendasi yang dihasilkan serta memastikan bahwa rekomendasi ditindaklanjuti oleh K/L terkait.
Sumber Data	Rata-rata capaian persentase rekomendasi kebijakan pada unit Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri yang ditindaklanjuti oleh K/L terkait.
Cara Menghitung	$\text{Capaian} = \frac{\text{Jumlah rekomendasi kebijakan pada unit Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri yg ditindaklanjuti K/L terkait}}{\text{Jumlah capaian rekomendasi kebijakan pada unit Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri}} \times 100\%$
<b>Sasaran Strategis 2</b>	<b>Pemenuhan Layanan Dukungan Manajemen yang optimal</b>
<b>Indikator Kinerja 1</b>	<b>Nilai SAKIP</b>

<p>Definisi</p>	<p>Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah rangkaian yang sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi Pemerintah.</p> <p>Komponen Penilaian Evaluasi SAKIP berdasarkan PermenPANRB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi AKIP yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perencanaan Kinerja <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dokumen Perencanaan kinerja telah tersedia (6%)</li> <li>• Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (cascading) di setiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting) (9%)</li> <li>• Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan (15%)</li> </ul> </li> <li>2. Pengukuran Kinerja <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengukuran Kinerja telah dilakukan (6%)</li> <li>• Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan (9%)</li> <li>• Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian <i>Reward</i> dan <i>Punishment</i>, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien (15%)</li> </ul> </li> <li>3. Pelaporan Kinerja <ul style="list-style-type: none"> <li>• Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja (3%)</li> <li>• Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/ penyempurnaannya (4,5%)</li> <li>• Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya (7,5%)</li> </ul> </li> <li>4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal <ul style="list-style-type: none"> <li>• Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan (5%)</li> <li>• Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai (7,5%)</li> </ul> </li> </ol> <p>Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi Kinerja (12,5%)</p>
<p>Sumber Data</p>	<p>Hasil penilaian SAKIP Deputy Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Kemenko Polhukam dilakukan oleh Inspektorat Kemenko Polhukam</p>

Cara Menghitung	Predikat penilaian SAKIP ialah 0 sampai 100, dengan tujuh kriteria yaitu: <ol style="list-style-type: none"><li>1. AA (&gt;90-100)</li><li>2. A (&gt;80-90)</li><li>3. BB (&gt;70-80)</li><li>4. B (&gt;60-70)</li><li>5. CC (&gt;50-60)</li><li>6. C (&gt;30-50)</li><li>7. D (0-30)</li></ol>
<b>Indikator Kinerja 2</b>	<b>Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat Deputi</b>
Definisi	Salah satu bentuk evaluasi yang harus dilakukan dalam perbaikan pelayanan adalah melakukan survei kepuasan terhadap pengguna layanan. Mengingat jenis layanan khususnya layanan publik sangat beragam dengan sifat dan karakteristik yang berbeda, maka survei kepuasan terhadap pengguna layanan dapat menggunakan metode dan teknik survei yang sesuai.  Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan di (nama unit) Kemenko Polhukam, perlu disusun indeks kepuasan layanan dengan menggunakan metode skala bipolar yang mengukur baik tanggapan positif ataupun negatif terhadap suatu pernyataan, dimana metode tersebut sering dikenal dengan skala <i>likert</i> .  Indeks kepuasan layanan Sekretariat Deputi adalah satuan hitung untuk mengukur tingkat kepuasan <i>stakeholders</i> di lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri terhadap pelayanan Kesekretariatan
Sumber Data	Hasil survei kepuasan layanan Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri dari <i>stakeholders</i> .
Cara Menghitung	Penilaian berdasarkan hasil survei bagian administrasi dengan menggunakan kategorisasi skala likert: <ol style="list-style-type: none"><li>1. 1,00-1,79 = Sangat tidak puas</li><li>2. 1,80-2,59 = Tidak puas</li><li>3. 2,60-3,39 = Cukup puas</li><li>4. 3,40-4,19 = Puas</li><li>5. 4,20-5,00 = Sangat puas</li></ol> Adapun indeks kepuasan layanan Sekretariat Deputi dihasilkan dari perhitungan kuisioner yang diberikan kepada <i>stakeholder</i> Sekretariat Deputi Bidkooor Pollugri (unit Asisten Deputi dan K/L teknis dibawah koordinasi Deputi Bidkooor Pollugri) dengan menghitung rata-rata ( <i>mean</i> ) nilai yang diberikan oleh responden pada masing-masing pertanyaan.

Jakarta, Januari 2024  
Deputi Bidang Koordinasi  
Politik Luar Negeri



Rina P. Soemarno